



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 06.A TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta fungsi pendidikan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat mengalokasikan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Padang sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2011.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 06);
29. Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 153.123.173.823,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 810.190.693.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 225.941.021.836,55</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.1.189.254.888.659,55</u>

2. Belanja :

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 741.640.562.474,05
2) Belanja bunga	Rp. 0,00
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja hibah	Rp. 43.958.373.274,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 58.779.481.066,00
6) Belanja bagi hasil	Rp. 0,00
7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 0,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
	Rp. 846.378.416.814,05

- b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 38.340.669.414,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 170.415.383.435,70
3) Belanja modal	<u>Rp. 175.259.804.155,80</u>
	<u>Rp. 384.015.857.005,50</u>

Jumlah Belanja Rp.1.230.394.273.819,55

Defisit Rp.(41.139.385.160,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 46.464.284.160,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 5.324.890,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.41.139.385.160,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II sepanjang mengenai Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 9 Maret 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

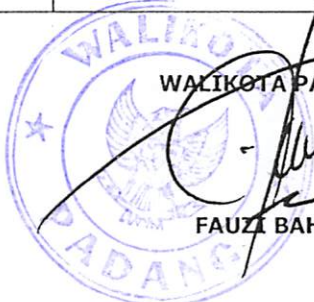

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 06.A

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PENDAPATAN	1,189,254,888,659.55
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153,123,173,823.00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	96,840,000,000.00
1.1.1.1.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	38,889,135,140.00
1.1.1.2.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5,250,780,000.00
1.1.1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	12,143,258,683.00
1.1.1.4.		
1.2.	DANA PERIMBANGAN	810,190,693,000.00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	45,028,364,000.00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	711,730,929,000.00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	53,431,400,000.00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	225,941,021,836.55
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	41,115,000,000.00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	46,813,332,836.55
1.3.4.	DANA PENYUSUNAN DAN OTONOMI KHUSUS	122,853,489,000.00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	15,159,200,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,189,254,888,659.55
2.	BELANJA DAERAH	1,230,394,273,819.55
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	846,378,416,814.05
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	741,640,562,474.05
2.1.4.	BELANJA HIBAH	43,958,373,274.00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	58,779,481,066.00
2.1.8.	BELANJA TAK TERDUGA	2,000,000,000.00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	384,015,857,005.50
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38,340,669,414.00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170,415,383,435.70
2.1.3.	BELANJA MODAL	175,259,804,155.80
	JUMLAH BELANJA	1,230,394,273,819.55
	SURPLUS/(DEFISIT)	(41,139,385,160.00)

No 1	Uraian 2	Jumlah 3
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	41,139,385,160.00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	46,464,284,160.00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	46,464,284,160.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEBIAYAAN	46,464,284,160.00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,324,899,000.00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	5,324,899,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,324,899,000.00
	PEMBIAYAAN NETO	41,139,385,160.00
3.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-



 WALIKOTA PADANG



 FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 06. A. TAHUN 2011
 TANGGAL: 9 MARET 2011

PEMERINTAH KOTA PADANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	4	5
1.20. 1.20.05 00. 00. 4. 3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	225,941,021,836.55	Sebelumnya Rp. 210.781.821.836,55- bertambah sebesar Rp. 15.159.200.000,- berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintah Nagari Tahun 2011, sehingga menjadi Rp. 225.941.021.836,55.
1.20. 1.20.05 00. 00. 4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15,159,200,000.00	
1.20. 1.20.05 00. 00. 4. 3. 5. 01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	15,159,200,000.00	
1.20. 1.20.05 00. 00. 4. 3. 5. 01. 01.	Bantuan Keuangan dari Propinsi Sumatera Barat	15,159,200,000.00	Sebelum Rp 0.00 Bertambah sebesar Rp 15.159.200.000.00 Setelah Perubahan Rp 15.159.200.000.00

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 06.A TAHUN 2011
 TANGGAL : 9 MARET 2011

PEMERINTAH KOTA PADANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.01. 1.01.01. 17.	Program Pendidikan Menengah	979,690,500.00	Sebelumnya Rp. 679.690.500,- bertambah sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- = Rp. 300.000.000,- berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintah Nagari Tahun 2011, sehingga menjadi Rp. 979.690.500,-
1.01. 1.01.01. 17.	Pelaksanaan Pembuatan Pagar SMP Negeri 6 (Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus)	200,000,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 1.	Belanja Pegawai	4,525,000.00	Sebelum Perubahan Rp. 0,00
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	4,525,000.00	Bertambah Rp. 200.000.000,00
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,950,000.00	Setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	1,575,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN		
1	2	3	4		
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	400,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	400,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minuman	350,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makan dan Minuman rapat	350,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	750,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	750,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 3.	Belanja Modal	193,075,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 77. 5. 2. 3. 26. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar	193,075,000.00			
1.01. 1.01.01. 17.	Program Pendidikan Menengah				
1.01. 1.01.01. 17. 78.	Pelaksanaan Pembuatan Pagar SMA Negeri 2 (Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus)	100,000,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 1.	Belanja Pegawai	1,725,000.00	Sebelum Perubahan	Rp.	0,00
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	1,725,000.00	Bertambah	Rp.	100.000.000,00
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000.00	Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	525,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 78 5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	1,850,000.00			
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000.00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanj Dokumen/Administrasi Tender	300,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	300,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minuman	250,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makan dan Minuman rapat	250,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	500,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	500,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 3.	Belanja Modal	96,425,000.00	
1.01. 1.01.01. 17. 78. 5. 2. 3. 26. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar	96,425,000.00	
1.01. 1.01.01. 16.	Pogram Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	43,937,014,569.00	Sebelumnya Rp. 43.847.814.569,- bertambah sebesar Rp. 89.200.000,- berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintah Nagari Tahun 2011, sehingga menjadi Rp. 43.937.014.569,-
1.01. 1.01.01. 16. 91.	Bantuan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus).	89,200,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 1.	Belanja Pegawai	1,300,000.00	Sebelum Perubahan Rp. 0,00
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	1,300,000.00	Bertambah Rp. 89.200.000,00
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950,000.00	Setelah Perubahan Rp. 89.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	350,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	1,550,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	300,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minuman	250,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makan dan Minuman rapat	250,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	500,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	500,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 3.	Belanja Modal	86,350,000.00	
1.01. 1.01.01. 16. 91. 5. 2. 3. 26. 08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung/Kantor	86,350,000.00	

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 06.A TAHUN 2011

TANGGAL : 9 MARET 2011

PEMERINTAH KOTA PADANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM
 ORGANISASI : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.03. 1.03.01. 18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	26,008,023,351.60	Sebelumnya Rp. 12.238.023.351.60 bertambah sebesar Rp. 10.600.000.000 dan Rp. 3.170.000.000,- = Rp. 13.770.000.000,- berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintah Nagari Tahun 2011, sehingga menjadi Rp. 26.008.023.351,60,-.
1.03. 1.03.01. 18. 10.	Pengsapanan Jalan dengan Hotmix (Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus)	10,600,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 1.	Belanja Pegawai	36,350,000.00	Sebelum Perubahan Rp. 0,00
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	36,350,000.00	Bertambah Rp. 10.600.000.000,00
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,450,000.00	Setelah Perubahan Rp. 10.600.000.000,00
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	8,900,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	16,500,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2,500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN		
1	2	3	4		
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 03. 01.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	2,000,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	2,500,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minuman	2,500,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makan dan Minuman rapat	1,230,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 11. 04.	Belanja Makan dan Minuman kegiatan	1,270,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	4,000,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 3.	Belanja Modal	10,547,150,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 10. 5. 2. 3. 21. 01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10,547,150,000.00			
1.03. 1.03.01. 18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
1.03. 1.03.01. 18. 11.	Pengerasan Jalan dengan Beton (Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus)	3,170,000,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 1.	Belanja Pegawai	17,525,000.00			
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	17,525,000.00	Sebelum Perubahan	Rp.	0,00
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,250,000.00	Bertambah	Rp.	3.170.000.000,00
			Setelah Perubahan	Rp.	3.170.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	7,275,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	13,500,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,500,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 03. 01.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	2,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minuman	2,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makan dan Minuman rapat	990,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 11. 04	Belanja Makan dan Minuman kegiatan	1,010,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	3,000,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 3.	Belanja Modal	3,138,975,000.00	
1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 3. 21. 01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3,138,975,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.04. 1.03.01. 15.	Program Pengembangan Perumahan	11,262,341,400.00	Sebelumnya Rp. 10.262.341.400,- bertambah sebesar Rp. 700.000.000,- dan Rp. 300.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintah Nagari Tahun 2011, sehingga menjadi Rp. 11.262.341.400,-.
1.04. 1.03.01. 15. 9.	Perbaikan Jalan Lingkungan (Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus)	700,000,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 1.	Belanja Pegawai	15,850,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	15,850,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000.00	Sebelum Perubahan Rp. 0,00
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	8,350,000.00	Bertambah Rp. 700.000.000,00
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	8,350,000.00	Setelah Perubahan Rp. 700.000.000,00
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	8,449,500.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,499,500.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1,499,500.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 03. 01.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	2,000,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minuman	990,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman rapat	990,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,960,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1,960,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 3.	Belanja Modal	675,700,500.00	
1.04. 1.03.01. 15. 9. 5. 2. 3. 21. 01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	675,700,500.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13.	Pembangunan Kantor LPM Pengambiran dan Penataan Taman Tugu Kantor Lurah Ampalu Kec. Lubuk Begalung (Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat Khusus)	300,000,000.00	
			Sebelum Perubahan Rp. 0,00
			Bertambah Rp. 300.000.000,00
			Setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 1.	Belanja Pegawai	6,875,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	6,875,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,350,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	2,525,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	5,225,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,745,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	995,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	750,000.00	
1.04. 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 2 03. 01.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	500,000.00	
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00	
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	750,000.00	
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minuman	750,000.00	
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 2. 11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman rapat	750,000.00	
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,480,000.00	
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1,480,000.00	
1.04 1.03.01. 15. 13. 5. 2. 3.	Belanja Modal	287,900,000.00	
1.04 1.03.01. 15 13 5 2. 3 26 08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan gedung	287,900,000.00	

